

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Akun.)



oleh :

**Yulia Syefira**

**NIM: 4317094**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi (S.Akun)



oleh :

**Yulia Syefira**

**NIM: 4317094**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Syefira

NIM : 4317094

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemdada OPD Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 30 Januari 2023

Yang menyatakan,



**Yulia Syefira**  
**NIM.4317094**

## NOTA PEMBIMBING

**H. Gunawan Aji, M.Si.**

Jalan Ampera No 37, Pagongan Tegal

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yulia Syefira

Kepada

Yth. Dekan FEBI UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Yulia Syefira

NIM : 4317094

Prodi : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan)**

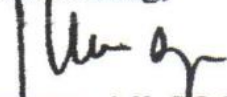
Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pekalongan, 30 Januari 2023**

**Pembimbing,**



**H. Gunawan Aji, M.Si.**

**NIP. 19692272007121001**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan  
Website: [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id) | Email: [febi@uingusdur.ac.id](mailto:febi@uingusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Aburrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari:

Nama : **Yulia Syefira**  
NIM : **4317094**  
Prodi : **Akuntansi Syari'ah**  
Judul : **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

**Ade Gunawan, M.M.**

**NIP. 19810425 201503 1 002**

Penguji II

**Ina Mutmainah, M.Ak.**

**NIP. 19920331 201903 2 007**

Pekalongan, 30 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19750220 199903 2 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te

ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū



### 3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlatun*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f ātimah*

### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dikembangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

### 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata. Huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirohim*

Ucapan Syukur hanya kepada Engkau ya Rabb, yang maha memudahkan segala urusan hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.

Sebagai bentuk cinta dan tanda kasih, saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ibu Siti Chabibah dan Bapak Rohmat terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan dan nasihat serta kasih sayang yang tiada henti.
2. Kakak saya Desi Noviana dan adik saya Ayu Rahmawati yang telah menjadi penyemangat serta motivasi yang diberikan, serta kedua keponakan saya Safina Hana Nafisah dan Qiana Sheza yang selalu menghibur dengan tingkahnya yang lucu.
3. Bapak Ade Gunawan, M.M., Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A., dan rekan-rekan mahasiswa Aksya 2017 yang memberikan dukungan.
4. Dosen Pembimbing Bapak H. Gunawan Aji, M.Si dan dosen penguji yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini
5. Alvita Tyas Dwi Aryani selaku dosen penasihat Akademik (DPA).
6. Sahabat saya Farida Nur masithoh dan Zannuba Arifa yang selalu memberikan semangat dan membantu memberikan solusi walaupun tidak berguna dan teman saya lainnya.
7. Support system saya Muhammad Jamaludin yang selalu bikin sakit hati
8. Diri saya sendiri karena sudah mau melangkah sejauh ini

**MOTO**

إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي

**“Asalkan tidak ada kemarahan dariMu kepadaku, aku tidak peduli”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Emha Ainun Nadjib, *Pemimpin Yang “Tuhan”*, (Yogyakarta : Bentang, 2018), hlm.103.

## **ABSTRAK**

**Yulia Syefira.** Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemda OPD Kabupaten Pekalongan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui angket/kuesioner yang telah dibagikan secara langsung. Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 responden dari 24 OPD. Masing-masing OPD terdapat 3 responden yang terdiri dari Kepala Dinas, kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan. Kasubbag keuangan, dan Staf bagian keuangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dibantu aplikasi SPSS Statistic 25.0.

Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (3) kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

## ABSTRACT

Yulia Syefira. The Influence of Human Resource Competence and Application of the Regional Financial Accounting System on the Quality of Regional Financial Reporting (Empirical Study of the Regional Government of Pekalongan Regency Opd).

This study aims to examine the influence of human resource competence, the application of the regional financial accounting system to the regional government of OPD Pekalongan Regency. The data used in this study are primary data obtained through questionnaires that have been distributed directly. The number of samples used in this study were 72 respondents from 24 OPD. Each OPD had 3 respondents consisting of the Head of the Service, the head of the finance sub-section and the staff of the finance section. Head of subdivision of finance, and staff of the finance section. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS Statistics 25.0 application.

The results of the study using multiple linear regression show that: (1) human resource competence has a positive effect on the quality of regional financial reports. (2) the regional financial accounting system has a positive effect on the quality of regional financial reports. (3) the competence of human resources and regional financial accounting systems simultaneously has a significant effect on the quality of regional financial reports.

Keywords: Competence of Human Resources, Regional Financial Accounting System, Quality of Regional Financial Reporting.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim...*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan)**”. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud, antara lain kepada yang terhormat:

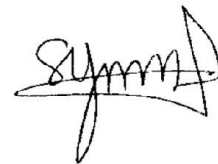
1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan kepada para Wakil Rektor beserta para stafnya yang selalu menjadi panutan bagi penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mempermudah urusan-urusan akademika hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah
4. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt. M.S.A., C.A selaku Sekretaris Prodi Prodi Akuntansi Syariah dan kepada seluruh staf pengajar Prodi Akuntansi Syariah yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Alvita Tyas Dwi Aryani selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dari awal kuliah hingga sampai pada tahap ini.
6. H. Gunawan Aji, M.Si Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.



7. Bapak/ Ibu kepala pustaka beserta stafnya di lingkungan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berpartisipasi dalam memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
8. Ucapan terimakasih yang teramat banyak penulis haturkan kepada kedua orang tua yang telah mendoakan, memperjuangkan, memberikan semangat dan kasih sayang.
9. Segenap teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi Syariah, serta para sahabat penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dan rahmat dari Allah Swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbal alamin.

Pekalongan, 30 Maret 2023



Yulia Syefira

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Deskripsi Teori .....	11
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia	
a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	11
b. Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	12
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	
a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	15
b. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	17
3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah	
a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	19
b. Standar Kualitas Laporan Keuangan .....	20
B. Penelian Relevan .....	22
C. Kerangka Berpikir .....	38
D. Hipotesis .....	41
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi .....	42
D. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel .....	43
E. Variabel Penelitian .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	49
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	50

## **BAB IV HASIL DATA DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Data Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan**

Daerah .....	56
1. Uji Frekuensi Distribusi .....	57
2. Uji Instrumen .....	60
3. Uji Asumsi Klasik .....	65
4. Uji Hipotesis .....	68

### **B. Pembahasan .....**

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	75
2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	77
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Relevan.....	22
Tabel 3.1	Daftar OPD Kab Pekalongan .....	43
Tabel 3.2	Definisi Indikator Variabel.....	46
Tabel 3.3	Skala Likert .....	49
Tabel 4.1	Kriteria Skala Likert.....	57
Tabel 4.2	Indikator Variabel Penelitian .....	57
Tabel 4.3	Frekuensi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	58
Tabel 4.4	Frekuensi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	59
Tabel 4.5	Frekuensi Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	60
Tabel 4.6	Analisis Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	61
Tabel 4.7	Analisis Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	62
Tabel 4.8	Analisis Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	63
Tabel 4.9	Hasil Uji Reabilitas Instrumen .....	64
Tabel 4.10	Uji Normalitas SPSS .....	65
Tabel 4.11	Uji Heteroskedostistas .....	66
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.13	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	68
Tabel 4.14	Hasil Uji t (Parsial) .....	71
Tabel 4.15	Hasil Uji F.....	73
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	74

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	40
----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Permohonan Ijin Penelitian .....	I
Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian .....	II
Lampiran 3: Indikator dan Angket Penelitian .....	III
Lampiran 4: Hasil Angket Penelitian .....	VIII
Lampiran 5: Dokumentasi .....	XVII
Lampiran 6: Output SPSS .....	XX
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup .....	XXXIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2015). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi- organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggung gjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2017 dalam Mardiasmo, 2018).

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena: pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan,



Selain itu penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2018).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2019). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

*Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang *et al.* (1999) dalam Xu *et al.* (2003) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi

dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-*download* dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020. Permasalahan itu terdiri dari 28 persen kelemahan sistem, 29 persen ketidakpatuhan, dan 43 persen ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan. Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 156,49 miliar atau 1,2 persen dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp12,64 triliun. <https://amp.kompas.com.2020>

Organisasasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mendapatkan prestasi yang bagus, karena mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 7 tahun Sejak tahun 2015 – 2022 ([jateng..bpk.go.id/kabupaten-pekalongan-tujuh-kali-berturut-turut-raih-wtp/](http://jateng.bpk.go.id/kabupaten-pekalongan-tujuh-kali-berturut-turut-raih-wtp/)). Hal ini membuktikan bahwa sistem laporan akuntansi dan Sumber daya manusia untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah telah bekerjasama dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar

semakin bagus dan meningkat di butuhkan peningkatan kualitas elemen elemen yang mempengaruhi hasil Laporan keuangan daerah, khususnya Sumber daya manusia sebagai subjek pembuatan laporan keuangan daerah serta sistem akuntansi keuangan Daerah sebagai aturan khusus pembuatan laporan keuangan daerah.

Pemilihan OPD Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian karena provinsi Jawa tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, ditahun yang sama pula didaerah Jawa tenggah, hanya Kabupaten Pekalongan yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*). Ini wujud nyata *political will* pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan. ([jateng.bpk.go.id/kabupaten-pekalongan-tujuh-kali-berturut-turut-raih-wtp/](http://jateng.bpk.go.id/kabupaten-pekalongan-tujuh-kali-berturut-turut-raih-wtp/)).

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan *good government*. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara profesional. Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap *good governance* dalam hubungan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah korupsi yang cenderung menjadi karakter

tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan sumber daya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan) ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif Terhadap positif Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

3. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap positif kualitas laporan keuangan daerah

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai media untuk evaluasi kinerja dan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah agar menjadi lebih baik.

###### b. Bagi Pengusaha

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengambil keputusan serta kebijakan terhadap keadaan ekonomi daerah.

###### c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat mengenai kinerja dari pemerintah daerah

##### 2. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini bisa memberi rujukan kepada OPD dalam memecahkan masalah organisasi serta dapat juga sebagai salah satu media untuk evaluasi terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kemampuan berpikir mahasiswa atas teori mata kuliah program studi akuntansi Syariah.

c. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi penelitian yang sejenis dimasa mendatang.



- d. Hasil dari penelitian ini bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat awam terkait keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang memiliki tujuan agar memudahkan pemahaman serta pembahasan permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik serta benar. Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II            KERANGKA TEORI**

Landasan teori yang berisi tentang uraian mengenai landasan teori, Penelitian Relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi tentang jenis serta pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel, instrument, dan teknik pengumpulan data penelitian, teknik pengolahan serta analisis data.

### **BAB IV           ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

**BAB V          PENUTUP**

Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran –  
saran yang berkaitan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Dari hasil Tabel Uji t 4.14 dapat disimpulkan bahwa variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 2,895 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $2,895 > 1,997$  dan nilai signifikansinya  $0,005 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Dari hasil Tabel Uji t 4.14 dapat disimpulkan bahwa variabel independen Sistem Akuntansi keuangan Daerah mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 4,261 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $4,261 > 1,997$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel independen Sistem Akuntansi keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Sistem Akuntansi keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Dari hasil Tabel Uji F 4.15 dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,261 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $26,263 > 3,13$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Sistem Akuntansi keuangan Daerah (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Sistem Akuntansi keuangan Daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah sebesar 42,3 %, artinya masih ada variabel yang lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Bagi OPD Kabupaten Pekalongan disarankan untuk memfasilitasi Karyawan dalam mengembangkan kemampuan mengatur Laporan keuangan daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah yang berlaku sehingga kompetensi Karyawan bisa lebih baik dalam membuat laporan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2013. *Analisis Regresi (Teori, Kasus dan Solusi) cet. 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Ansharul, & Putra, R. D. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Padang. *Academic Conference of Accounting Journal, 1*, 182–197. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7687136>
- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Erlina Rosdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual*. Medan: Brama Ardian
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (7th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2*(1), 53–64.
- Hardyansyah. (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar)* (p. 141). UIN Alauddin Makassar.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Teori Perusahaan Yang: Perilaku Manajerial, Biaya Agency Dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Keuangan, 3*,
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi ketiga*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13*(04),
- Munasyir. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4*.

- Mutmainnah. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemda Kabupaten Baru. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nalim, Yusuf dan Salafudin Turmudi. 2012. *Statistik Deskriptif*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (p. 128). [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008\\_SPIP.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf)
- Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Purnama Sari, R. (2019). Determinan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Skpd Kabupaten Kulonprogo. *Accounting Global Journal*, 3(2), 118–137. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3802>
- Rahayu, L., Kennedy, & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1–15.
- Rahmadani, S., Kamaliah, & Rofika. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Bara. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2),
- Rahman, D. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1),
- Rasuli, Dewi Astri Sasmita, Nasrizal dan M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)

- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota ). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*,
- Saifudin, S., & Aprilia, R. N. (2020). Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.83>
- Sarwono, A. E., & Handayani, A. (2021). Effect Technology Information On Quality Financial Statement With Internal Control As Moderating Variable. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(1), 9–13. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i1.42>
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 20(2), 179–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i2.843>
- Siregar, Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Kencana Group.
- Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. 2–203. Sedarmayanti. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Edisi Revisi. Bandung: PY. Refika Aditama.
- Sudarmanto. 2015. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 18). Alfabeta.
- Sugiyono, 2001, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *Jurnal E-Proceeding Of Management*, 6(1), 660–667.
- Utama, R. J., Tanjung, A. R., & Sofyan, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber

- Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten In. *JOM Fekon*, 4(1), 1429–1443.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 2(1).
- Yensi, D. S., Hasan, A., & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1), 1–16. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/714/649>
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada DPKAD se-Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–24.
- Yusrawati, Dewi Andini. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*. 26(1).